

## MANAJEMEN HIBAH DAN BANSOS (Studi Kasus tentang Manajemen Hibah Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo).

Oleh:  
Lilis Sulistyowati

### Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Menganalisis Manajemen Bantuan Sosial di Bagian Administrasi Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan Hibah Bantuan Sosial Pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo menggunakan teori George R Terry yang terdiri dari 1) Perencanaan, 2) Pengorganisasian, 3) Implementasi dan 4) Pengawasan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perencanaan harus diperoleh dalam mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. itu berarti bahwa sebagai pelaksana tugas saya, saya menyiapkan semua kebutuhan, memperbesar segala sesuatu yang menjadi pengeluaran, dan merumuskan bentuk-bentuk kegiatan konsultasi dana hibah. 2) Mengatur penganggaran dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah mengikuti pengaturan kesejahteraan rakyat.  
**Keyword:** Perencanaan, Pengorganisasian, Aktuasi, Pengendalian

### Pendahuluan

Pemberian bantuan hibah secara nasional bertujuan untuk meunjang sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, rasionalitas, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang sebagaimana di maksud dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2018 pasal 6 ayat 6 adalah organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar di kementerian dan berkedudukan di wilayah adminis-trasi pemerintah daerah dan memiliki kesekretariatan di daerah setempat.

APBD secara umum merupakan penjabaran anggaran-anggaran alokasi dana kepada masyarakat (*public money*) dan kepentingan publik untuk dapat diarahkan semaksimal mungkin untuk dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah, sedangkan penggunaannya harus dapat menghasilkan daya guna (*output*) untuk mencapai target/ tujuan dari pelayanan public (*public service*) dalam bentuk anggaran yang berbasis kepada masyarakat yang di-laksanakan oleh pemerintah daerah sebagai Pemangku kepentingan (*stakeholder*), (Erawati, 2009).

Besaran dana hibah yaitu di bagi menjadi maksimal 40% untuk kegiatan non fisik dan minimal 60% untuk kegiatan fisik. Prinsip dana hibah di bagi menjadi tiga yaitu prinsip pengelolaan dan penggunaan, prinsip

pelaksanaan, dan prinsip pertanggungjawaban. Adapun pen-jelasan dari masing-masing prinsip sebagai berikut: Prinsip pengelolaan dan penggunaan Dana Hibah adalah efektif, efisien dan transparan. Prinsip pelaksanaan dana hibah adalah akuntabel, terukur kinerja dan kualitasnya. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah secara administrasi, teknis dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dalam mendapatkan dana hibah tersebut tidak dilibatkan secara langsung dalam perencanaan, masyarakat belum paham tentang pengelolaan dana hibah mulai dari perencanaan pembuatan proposal sampai dengan pembuatan laporan pertanggung-jawaban anggaran dana hibah. Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa aspek pengendalian anggaran sebagai bagian dari bentuk monitoring dan evaluasi SKPD atas belanja hibah masih belum maksimal. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai, pengelolaan dana hibah Pemerintah Kabupaten Ponorogo Jawa Timur terkait dengan penertiban administrasi dalam laporan dana hibah bansos.

### Metode Penelitian

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif metodologi kualitatif

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan penelitiannya dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Pada penelitian ini, penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi. Berikut ini merupakan informan dalam Implementasi Hibah Bantuan Sosial di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pengelolaan Hibah Bansos (Studi tentang Pengelolaan Hibah Pada Bagian Administrasi Ke-sejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo) dalam hubungannya dengan indikator *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*.

Perencanaan. Hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan bahwa proses proses penganggaran dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tata kelola yang ada dan sudah diatur dalam bidang kesejahteraan rakyat. Mulai dari proses pengajuan proposal dari masyarakat sampai dengan laporan dana hibah yang sudah digunakan oleh masyarakat.

Pengorganisasian. Hasil penelitian di lapangan dapat di-katakan bahwa proses proses pengorganisasian, yaitu: (a) pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; (b) pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang logik dapat dilaksanakan oleh satu orang; dan (c) pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk meng-koordinasikan pekerjaan para anggota menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan proses penganggaran dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tata kelola yang ada dan sudah diatur dalam bidang kesejahteraan rakyat.

Sosialisasi itu yang meng-adakan dari bagian Kesejahteraan rakyat, saya hanya memberi wewenang dari pusat ke bagian Kesejahteraan rakyat saja, kita hanya ikut mengawasi dan membantu seperlunya saja. Tapi yang menjalankan pelaksanaan bagaimana mekanisme hibah bansos dan termasuk sosialisasinya. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa pada pelaksanaan pelaku kebijakan dalam menerapkan kebijakan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam proses proses pengajuan hibah menimbulkan kepuasan kepada masyarakat umum untuk mengikuti prosedur yang berjalan sesuai dengan SOP.

Anggaran ditetapkan dan dicairkan kepada organisasi keagamaan di lingkungan masya-rakat, selanjutnya akan diverifikasi dan dievaluasi dalam proses pelaporan dana Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).

Terdapat beberapa faktor perencanaan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pegawai dinas bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten. Perencanaan yang akan ditempuh dalam mencapai tujuan menyehatkan masyarakat. berarti selaku pelaksana tugas saya mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana hibah.

Bagian Administrasi Ke-sejahteraan Rakyat dan Ke-masyarakatan, dalam pelaksanaan melaksanakan perencanaan sudah maksimal mulai dari pelaksanaan verifikasi, selain itu program kerja secara terinci sudah dibuat, mekanisme kerja sudah jelas, sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) harus dijalankan sesuai alurnya

Terdapat beberapa faktor pengorganisasian dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pegawai dinas bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten. Proses pengorganisasian penganggaran dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tata kelola yang ada dan sudah diatur dalam bidang kesejahteraan rakyat. Mulai dari proses pengajuan proposal dari masyarakat sampai dengan laporan dana hibah yang sudah digunakan oleh masyarakat.

Pengorganisasian sudah berjalan dengan efisien, efektif, transparan dan akuntabel. walaupun beberapa aspek yang dinilai belum optimal dan belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai penggunaan dana Hibah Bansos Kabupaten Ponorogo, seharusnya di dukung dengan sosialisasi menggunakan media massa di Ponorogo.

Terdapat beberapa faktor pelaksanaan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pegawai dinas bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten. Pelaksanaan pihak bagian Kesejahteraan rakyat sendiri mengadakan sosialisasi dalam pelaksanaan program hibah yang disampaikan kepada organisasi keagamaan masyarakat.

Sosialisasi itu yang mengadakan dari bagian Ke-sejahteraan rakyat, saya hanya memberi wewenang dari pusat ke bagian Kesejahteraan rakyat hanya ikut mengawasi dan membantu seperlunya untuk menjalankan pelaksanaan bagaimana mekanisme hibah bansos dan termasuk sosialisasinya urusan bagian Kesejahteraan rakyat.

## **Penutup**

Terdapat beberapa faktor pengawasan dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang dilakukan oleh pegawai dinas bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten. Pelaporan penggunaan dana hibah dialporkan sesuai dengan dana yang dicairkan kepada masyarakat, jadi bidang kesejahteraan rakyat hanya melakukan pengawasan atas dana yang sudah tersalurkan bantuan hibah kepada masyarakat.

Manajemen pengawasan terhadap proses laporan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaan dari awal sampai dengan pelaporan akhir dari setiap

## **Daftar Pustaka**

Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Keenam. Jakarta, Bumi Aksara

Atmosoedirdjo, Prajudi, 1986. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta : UI Press.

Mulyana, Deddy.2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Parson, Wayne. Tribowo Budi Santoso (alih bahasa). (2005) *Public Policy: Pengantar teori dan praktek analisis kebijakan*. Jakarta, Prenade Media.

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pelangi Aksara Yogyakarta

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 22 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

R.Terry, George dan Leslie W.Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju. Bandung.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta. Bandung